



**PERTEMUAN REGULER IX
KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) TUNA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR (NTT)**

27 Agustus 2019

Disiapkan oleh : A. Riza Baroqi/Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia-MDPI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	03
TUJUAN	03
PESERTA	04
HASIL KEGIATAN	04
RANGKUMAN AGENDA	07
KUMPULAN FOTO KEGIATAN	08
LAMPIRAN	09
- Lampiran I. Jadwal Kegiatan	09
- Lampiran II. Daftar Peserta	11
- Lampiran III. Rencana Kerja 6 (Enam) Bulan Kedepan termasuk Rekomendasi Pertemuan	13

PENDAHULUAN

Amanah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harus dikelola secara berkelanjutan, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya, maka tata kelola yang baik menjadi syarat dalam pencapaian misi mewujudkan kedaulatan pangan ikan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wilayah Nusa Tenggara Timur terletak diantara WPP 713, 714 dan 573 yang merupakan wilayah potensi produksi tuna nasional, serta menjadi bagian dari Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 107/KEPMEN-KP/2015. Amanat Menteri Kelautan dan Perikanan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pelaku Usaha mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP-TCT secara konsisten.

Untuk mendukung hal tersebut, sangatlah diperlukan keterlibatan secara aktif pemangku kepentingan dalam mengelola bersama perikanan tuna, khususnya pihak industri, akademisi, praktisi dan masyarakat. Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee /FCMC*) Tuna, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wadah kolaborasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan bersama untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan, terutama untuk wilayah perairan Provinsi NTT.

Untuk mencapai pertemuan yang efektif dan terukur, dari rencana aksi yang telah disusun pada pertemuan ke-8 pada 11 Desember 2018 yang lalu, diperlukan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan hasil pencapaian, tantangan dan mendiskusikan yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kendala, serta menyiapkan kembali rencana aksi untuk 6 bulan ke depan.

TUJUAN

1. Berbagi informasi capaian rencana kerja program *FCMC* Provinsi NTT enam bulan terakhir dan rekomendasi hasil pertemuan Regional *FCMC* 16 Januari 2019 di GMB II Jakarta.
2. Konsultasi draft Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna (*Fisheries Co-Management Committee/FCMC*)
3. Kebijakan Pengelolaan Perikanan di Provinsi NTT
4. Sosialisasi Rencana Revitalisasi system informasi *Record of Vessel Authorized to Fish for Tuna within Indonesia Archipelagic Waters and Zona Exclusive Economy (RVIA)*
5. Karakterisasi Perikanan Tuna Indonesia yang menggunakan rumpon (A Characterization of Indonesia's FAD-Based Tuna Fisheries (Final report ACIAR)
6. Penyampaian hasil pendataan oleh MDPI di Site Kupang (IFISH)
7. Berbagi informasi kegiatan beberapa LSM dan Asosiasi yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan di Provinsi NTT
8. Penyusunan rencana kerja 6 bulan KPDP TCT Provinsi NTT.

PESERTA

Peserta pertemuan yang hadir sejumlah 39 orang terdiri dari 7 orang perempuan dan 32 orang laki-laki. Peserta pertemuan berasal dari DJPT KKP, Pusrisikan, DKP Provinsi NTT, Cabang Dinas KP Prov. NTT Wilker Kota Kupang, DKP Kota Kupang, PPI Oeba, PP Tenau, DPMPTSP, Bappelitbangda, Poltek KP Kupang, SUPM Kupang, UMK, UNDANA, UNKRIS, HNSI NTT, Lantamal 7, Ditpolairud, KSOP Kupang, UD. BM, CV. CEP, PT. Jala Sembilan, PT. Primo Indo Ikan, AP2HI, TNC. Beberapa peserta undangan tidak hadir yaitu Sesditjen Perikanan Tangkap UP Sub bag. Kerjasama, Perwakilan seluruh nelayan, Supplier tuna lokasi MDPI mengambil data (UD. Bara, CV ASK dan UD. Tunas Harapan), WWF, IPNLF dan Anova.

HASIL KEGIATAN

SAMBUTAN dan PEMBUKAAN ACARA

Saut Tampubolon (direktur Eksekutif MDPI)

- Perikanan tuna saat ini sedang terancam punah dikarenakan banyaknya aktivitas penangkapan yang mana nelayan sudah banyak menggunakan kapal yang besar, alat tangkap semakin canggih, dll.
- Pemikiran ikan tidak akan habis itu sudah tidak digunakan lagi dimana mortalitas lebih tinggi
- Untuk yellowfin tuna sudah terancam punah atau overfish
- Hal ini bisa dihitung melalui HS
- Dibutuhkan data yang banyak dan lebih bagus untuk memudahkan dalam manajemen perikanan tuna selanjutnya
- Perlu adanya kolaborasi untuk membangun perikanan tuna bersama-sama

Ganef Wurgiyanto (Kadis KP Provinsi NTT)

- NTT terkenal menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu Pole and Line dan Handline
- Namun KKP memberikan izin adanya penangkapan purse sein
- Perlu adanya pengontrolan terhadap perikanan tuna agar dapat dikelola dengan baik.
- Harapannya apa yang dilakukan hari ini bisa memberikan perikanan tuna dalam pengelolaannya menjadi lebih baik
- Data yang berkualitas akan menghasilkan pengelolaan yang baik juga

ACARA (MATERI PRESENTASI)

Agustinus Anung Widodo (Pusrisikan),

tentang Karakterisasi Perikanan Tuna Indonesia yang menggunakan rumpon (A Characterization of Indonesia's FAD-Based Tuna Fisheries (Final report ACIAR)

- Hampir 10 tahun melakukan pendataan perikanan tuna dari rumpon
- Jenis tuna ada beberapa macam yang mana tuna tropis (cakalang, madidihang dan mata besar), tuna temperate (albakora dan tuna sirip biru), tuna neritik (krai, kawa-kawa, lisong, tongkol abu-abu) dan spesies mirip tuna (tuna gigi anjing dan slender tuna)
- Hasil tangkapan tuna di dunia ditangkap dirumpon 30-50%
- Banyak digunakan pada samudra hindia yaitu rumpon hanyut. Biasanya kapal pursein yang menggunakannya

- Isunya banyak yang melapor rumpon ada tiga (3), namun fakta dilapangan bisa lebih dari 30 rumpon
- Jenis rumpon di Indonesia yaitu rumpon hanyut dan rumpon berjangkar
- Ponton banyak digunakan nelayan filiphina
- Rumpon dengan jarak 5-10 km hanya bertahan 2,5 hari dirumpon
- Di Indonesia, jarak antara rumpon satu dengan rumpon lain kurang dari 10 mil.
- Skipjack/Cakalang memiliki tingkat mortalitas lebih rendah, dan mampu menghasilkan 5000 telur ketika memijah dengan tingkat penetasan telurnya lebih bagus
- Kebanyakan nelayan NTT mancing di daerah selatan (Samudera Hindia)

Mumpuni Setya Pratiwi (DJPT, KKP)

tentang Sosialisasi Rencana Revitalisasi system informasi *Record of Vessel Authorized to Fish for Tuna within Indonesia Archipelagic Waters and Zona Exclusive Economy (RVIA)*

- DIVA (*Database of Indonesian Vessel Authorized*) tuna ini merupakan mengintegrasikan kapal-kapal tuna untuk di tracing dalam pengelolaan tuna, merupakan nama baru yang dahulunya R-VIA.
- Memuat dan menampilkan daftar atau informasi kapal yang diberikan SIPI dan atau BPKP untuk melakukan penangkapan TCT di perairan kepulauan, teritorial dan ZEE Indonesia
- Sistem yang dikembangkan terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem informasi kapal daerah (< 30 GT) dan sistem informasi perizinan kapal ikan pusat berukuran di atas 30 GT. Daftar kapal yang ditampilkan adalah kapal-kapal penangkap TCT yang sah secara hukum beroperasi di perairan Indonesia.
- Terdapat laman khusus admin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penggunaan sistem informasi kapal penangkap tuna untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan maupun dalam mendukung usaha perikanan, khususnya penetapan alokasi TCT Pusat dan Daerah, serta perdagangan ikan TCT yang dilakukan.
- Sebagai bentuk penyempurnaan R-VIA, DIVA-TUNA tidak lagi memerlukan proses input data tetapi terintegrasi dengan data yang sudah terinput melalui mekanisme SIPEPI dan SIMKADA Pada DIVA Tuna, ketika ada buyer ingin mengetahui legalitas kapal maka dapat langsung di cek (Akses Publik)
- DIVA Tuna dapat diakses oleh nasional atau internasional
- Data yang jika sudah terupload akan berwarna merah namun jika kapal baru akan berwarna hijau.

Diskusi :

(Q): Siprianus seru (DKP Prov. NTT) Kapan mengetahui kapal yang aktif atau tidak di DIVA Tuna? Selain itu, banyak gross akta yang tidak selesai. Hanya sebatas gross akta sementara

(A) Saut Tampubolon : Pada DIVA perlu dibuatkan klasifikasi berdasarkan jenis kapal, ukuran, alat tangkap, waktu izin expired, dll. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui kapal yang masih aktif/tidak, dengan ditambahkan notifikasi pada sistem untuk kapal-kapal yang izinnya sudah mendekati expired. Data kapal di DIVA Tuna ini di supply dari SIMKADA. Namun kapal 5 GT tidak masuk dalam SIMKADA, karena izin kapal berada di PTSP, yang aplikasinya berbeda/tidak terintegrasi dengan SIMKADA. Oleh karena itu harapannya kedepan dapat teritegrasi

Alif Darmawan (MDPI)

Perkembangan proses pendataan dan kegiatan MDPI di PPI Oeba

- Mendata di 3 supplier (CV. ASK, UD. TH dan UD. Bara)
- Sampling 20% dari total kapal bongkar bulanan pada ketiga supplier tersebut

Puncak tangkapan Tuna 3 tahun terakhir (bulan) ;

- Terbanyak bulan Mei (2017)
- Bulan Juli (2018)
- Bulan April (2019, namun belum total bulan di tahun 2019)

Frekuensi jenis umpan yg digunakan

- Frekuensi penggunaan umpan tiruan paling banyak digunakan mulai tahun 2017, 2018. 2019 didominasi oleh umpan jenis ikan tuna

Tangkapan sampingan terbanyak;

- 2017 FRI/ Tongkol krai/Frigate Tuna
- 2018 KAW/ Tongkol Kawa-kawa
- 2019 BLM/ Black Marlin/Setuhuk hitam

Panjang Ikan Tuna tersampling

- Tahun 2017, BET terpanjang 144 cm (bulan Juni), terpendek 35 cm (bulan Mei)
- Tahun 2018, BET terpanjang 142 cm (bulan November), terpendek 40 cm (bulan April)
- Tahun 2019, BET terpanjang 145 cm (bulan April), terpendek 44 cm (bulan April) (belum final)
- Tahun 2017, YFT terpanjang 173 cm (bulan Desember), terpendek 20 cm (bulan Mei dan Desember)
- Tahun 2018, YFT terpanjang 166 cm (bulan Mei dan Agustus) terpendek 20 cm (bulan Februari, April - September)
- Tahun 2019, YFT terpanjang 163 cm (bulan Maret), terpendek 20 cm (bulan April) (belum final)

Beberapa informasi tambahan terkait kegiatan MDPI di PPI Oeba ;

- Penggunaan Spot Trace sebagai pelacak/tracking kapal untuk mengetahui wilayah penangkapan ikan saat nelayan memancing
- Pengumpulan data berbasis elektronik (I-FISH Apps)
- Dua (2) orang mahasiswa UNDANA melakukan magang

Ilham Alhaq (AP2HI)

Kegiatan AP2HI di Provinsi NTT

- Fokus pada industri YFT dan SKJ
- Berdiri tahun 2014
- Perizinan PL sulit, baik izin kapal, maupun operasi
- Di NTT memiliki 4 member AP2HI
- AP2HI memiliki tujuan membangun kemitraan, promosi keberlanjutan perikanan, menyediakan informasi untuk member, pelatihan untuk anggota, traceability, mengelola sertifikasi, promosi produk perikanan di kancah internasional, dll.
- Fasilitasi registrasi kapal untuk kebutuhan sertifikasi, dan juga pengumpulan data tangkapan
- Syarat sertifikasi, tangkapan sampingan tidak melebihi 5% dari total tangkapan
- Syarat interaksi dengan ETP untuk sertifikasi MSC yaitu dibawah 2%

- Pemasangan VMS juga dilakukan untuk mengetahui daerah penangkapan untuk mendukung sertifikasi MSC
- Seluruh anggota AP2HI harus memenuhi kode etik AP2HI

Albert Seran, TNC (Konsultan)

- Program marine ada di Kupang, Fisheries ada di Bali
- Pendataan dimulai akhir 2017, di Larantuka
- Tahun 2019 memulai pendataan di Alor dan Lembata untuk perikanan karang

Diskusi :

(Q)

Wilson : Usulan presentasi untuk MDPI terkait CPUE.

Perlu fokus terhadap umpan, dikarenakan PL tidak bisa mancing tanpa umpan, sehingga perlu dilakukan manajemen yang baik

Popi (PPI Oeba)

Harapannya, selain mendata, juga melakukan fasilitasi kepentingan perusahaan/supplier untuk pemasaran ke Uni-Eropa. Selain itu, SIPI andon tidak dapat menjadi syarat SHTI, mengapa ?

Sriawan (UNMUH Kupang)

Apa hubungannya sertifikasi perikanan dengan BAN-PT (Nasional)?

Sejauh mana AP2HI/member berhubungan dengan lab. Pengujian mutu yang ada di NTT

Hilmar (PT. Primo Indo)

Izin rumpon melekat pada SIPI. Bagaimana jika SIPI dari provinsi, sedangkan rumpon di pasang >12 mil (Izin pusat)

Yesaya (DKP Prov. NTT)

Kendala pada Pas Besar pada nelayan perlu diperhatikan. Karena sampai saat ini, banyak nelayan hanya menggunakan pas besar sementara.

(A) ;

- CPUE sedang dalam perbaikan (MDPI)
- AP2HI menerima masukan dari perusahaan terkait kendala pasar. AP2HI akan membantu mencari solusi melalui instansi yang bersangkutan. Selain itu AP2HI juga membantu memenuhi syarat permintaan pasar bagi member.
- Perlu adanya perbaikan aturan agar sesuai dengan kondisi yang ada.
- Perlu dijalinnya kerjasama yang baik antara KSOP Kupang dan DKP Provinsi NTT, dalam pengurusan dokumen kapal perikanan.

RANGKUMAN DAN REKOMENDASI AGENDA

1. Kepala Dinas KP Prov. NTT menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi. Selain itu Kadis juga meminta kepada nelayan dan supplier agar memberikan/melaporkan data yang benar, karena data merupakan dasar dalam membuat kebijakan.
2. Perlu adanya perbaikan aturan terkait pengaturan rumpon.
3. Database kapal tuna R-VIA sudah berganti nama menjadi DIVA Tuna. Database ini terintegrasi dengan data yang sudah terinput melalui mekanisme SIPEPI dan SIMKADA. Namun, untuk daerah NTT, izin kapal berada pada DPMPTSP, dimana data kapal tidak terintegrasi dengan SIMKADA, sehingga perlu adanya perbaikan system agar dapat terintegrasi
4. Perlu adanya kejelasan aturan terkait rumpon. Dikarenakan izin rumpon melekat pada SIPI, sedangkan yang terjadi di lapangan adalah SIPI atas izin dari provinsi, sedangkan rumpon izin pusat. Bagaiman kira-kira mengatasi hal tersebut
5. Perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara KSOP Kupang dan DKP Provinsi NTT dalam hal pengurusan dokumen kapal perikanan, dalam rangka meningkatkan legalitas kapal perikanan

KUMPULAN FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Jadwal Kegiatan

Jadwal	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 10.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya • Pengantar dari Direktur Eksekutif MDPI, dilanjutkan dengan Konsultasi draft Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna (<i>Fisheries Co-Management Committee/FCMC</i>) Prov. NTT • Pengantar dari Kepala DKP Provinsi NTT • Foto bersama 	Panitia Saut Tampubolon (MDPI) DKP Provinsi NTT Panitia
10.00 – 10.15	Rehat Kopi	Panitia
10.15 – 10.45	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian, tantangan rencana aksi Komite Pengelola Perikanan Tuna, rekomendasi hasil pertemuan Regional Fisheries Co-Management Committee (FCMC) 16 Januari di Jakarta, dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan di Provinsi NTT • Diskusi 	DKP Prov. NTT Riza (MDPI)
10.45 – 12.15	Diskusi Panel	
10.45 – 11.15	<ul style="list-style-type: none"> • Karakterisasi Perikanan Tuna Indonesia yang menggunakan rumpon (A Characterization of Indonesia's FAD-Based Tuna Fisheries (Final report ACIAR) 	PUSRISKAN
11.15 -11.45	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Rencana Revitalisasi system informasi <i>Record of Vessel Authorized to Fish for Tuna within Indonesia Archipelagic Waters and Zona Exclusive Economy</i> (RVIA) 	Dit PSDI-KKP
11.45 – 12.15	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 	Wildan (MDPI)
12.15 – 13.15	ISHOMA	
13.15 – 13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil pendataan oleh MDPI di Site Kupang (IFISH) 	Alif/Amrollah (MDPI)
13.30 – 14.30 (Masing – Masing presentasi selama 15 Menit)	Berbagi informasi kegiatan beberapa LSM dan Asosiasi yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan di Provinsi NTT <ul style="list-style-type: none"> • WWF • TNC • AP2HI 	WWF NTT TNC NTT AP2HI Riza (MDPI)

Jadwal	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Diskusi	
14.30 – 14.45	Rehat Kopi	Panitia
14.45 – 16.00	Penyusunan rencana aksi bersama untuk 6 (enam) bulan kedepan	Wildan (MDPI)
16.00 – 16.15	Penutup	DKP Provinsi NTT

LAMPIRAN 2. Daftar Peserta

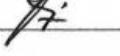
DAFTAR HADIR



Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
 Perikanan dan Kelautan
 Gedung 100, Jalan Raya
 Perikanan, No. 100, Jakarta 10132

AGENDA :
 DATE : Selasa, 27 Agustus 2019
 VENUE :

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
1		PRISCILYA MANUELA	PP TONDI KFO		081 256 820 840	f.
2		Robby Adam	DKP Kota Kupang		085 2 17 75 4005	h.
3		ILHAM AHAZI	APZHI	ilham28@apzhi.org	082126581028	f.
4		Mumpuni CI	DJPT -KKP	sli.djpt@yha.com		f.
5		FRANSISKO MEO	DKP cabang.	-	085 239 448 523	f.
6		ANUNGO WPT	CFR	anungw@jakod.co.id		an
7		Hilmar D.U	PT. Prima S.I	hilmar.dayas@gmail.com		f.
8		Martha Masy	BSOP	martha.lionel@gmail.com	082136882172	f.
9		M. Anstori	Lant amel f		085790244506	f.
10		Fransiska Pipa	Dpmprr		081 227 998 088	f.
11		Yunani D. Riwu	-	nobanyenogegmail.com	085 228 135 572	f.
12		ANITA MOSES	DPRP/PPU-MTI	anitamoses@gmail.com	081339 222 377	f.
13		Ghuang BF	CD BM		082149626022	f.
14		Zulfardine	CV. Charbi		08123646477	f.
15		Deley Dulca	DKP NTT	deleyriel@gmail.com	08123750110	f.
16		WHAM NURDIN	HNSI NTT		081 333 482 177	f.
17		Kamintan Tambam	Poltek KP	kamintan@stisyaindonesia.com	085394935710	f.
18		Yan Asrulan	DKP PROV. NTT	yanasrulan85@gmail.com	081 337 249 373	f.
19		Sauf W.	DKP NTT	saufw@kubang@gmail.com	081 144 937 777	f.
20		Ucco Langkodae	Supm		08129806660	f.
21		Samuel Batu	PPI Omba	asam_pollin@jaboo.co.id	081 236 694 81	f.
22		A-Riza Baraji	MDPI	riza@mdpi.or.id	08113863848	f.
23		Puji Samsa	PI-jaba samsa	pupi116@gmail.com	081 255 415 8216	f.
24		Siprius Soni	DKP. prov. NTT	hakirordano@gmail.com	08129320215	f.
25		Skriawan	UMK	skriawan.skriawan24@gmail.com	08113820982	f.
26		popi .p	PPI omba	jakico.co.id	081339410692	f.
27		Ermas D. Hamel.	Dkp Propins.			f.
28		M. LORIS HARATA	DITPOLAIRUD		082145155022	f.
29		Wilson Tisera	Unlaris	wilson_tisera@yahoo.com	082146509195	f.
30		Saut Tampubolon	MDPI			f.
31		Santri Dinakhusna				f.
32		Wildan				f.
33		Agnesa Dou	MDPI		081230802798	f.
34		REITS LOUDOE	MDPI			f.
35		Aludini Al Agubi	FTP Umda		085238723670	f.
36		Terezinha de Cavallo	Booppelitbangda	caamthetump@gmail.com	08123790140	f.

37	✓ Samuel L. Likun	CV. ARHADA SANJAYA	CV. ARHADA SANJAYA ^{Palas} sanjay @gmail.com	085 239 274 619	
38	✗ Albertus Seran	TRIC	abebaron@gmail.com	082144961900	
39	✓ Samudra Bin Jasin	DEP. DTT	Samudra Bin Jasin02@gmail.com ✗	08139378669	
40					
41					

LAMPIRAN 3. Rencana Kerja 6 (Enam) Bulan Kedepan termasuk Rekomendasi Pertemuan

No	Kegiatan	Indikator keberhasilan	PIC	Dana (Cash/in kind)	Waktu	Keterangan
1	Rapat Koordinasi dengan tujuh (7) Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (KCDKP) Provinsi NTT dalam hal penerbitan BPKP	Terlaksananya satu kali rapat koordinasi antar KCDKP Provinsi NTT	DKP Provinsi NTT (Ernes), MDPI (Wildan), 7 KCD	MDPI dan DKP Provinsi NTT	Oktober 2019	Tempat Aula DKP Provinsi NTT
2	Diseminasi informasi terkait program tagging Tuna kepada nelayan	1. Pusrisikan menyiapkan bahan diseminasi kepada DKP Provinsi dan stakeholder terkait 2. DKP dan stakeholder terkait akan menyampaikan kepada nelayan dalam setiap kegiatan pertemuan	Pusrisikan, dan DKP serta stakeholder terkait	0	September - Desember 2019	Pusrisikan mengirim email ke DKP Provinsi dan stakeholder
3	DKP Provinsi NTT akan bersurat untuk menyampaikan informasi ke DJPT terkait banyaknya rumpun dan kapal berizin API PSPB yang diduga mengganggu migrasi ikan Tuna pada perairan selat Ombai dan Laut Timor bagian barat, yang merupakan wilayah penangkapan nelayan kecil Prov. NTT	Diterimanya Surat dari DKP Provinsi NTT oleh DJPT	DKP Provinsi NTT, MDPI, DJPT KKP, PPI Oeba dan Tenau		Oktober 2019	
4	Sosialisasi terkait DIVA-Tuna	Terlaksananya satu kali sosialisasi oleh DJPT	DJPT	DJPT	Menyusul	Waktu menyusul

5	Kerjasama dalam mempercepat pengurusan dokumen kapal (Pas Kecil, Pas Besar, Gross Akta) antara DKP Prov. NTT dengan KSOP Kupang	Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara DKP Provinsi NTT dengan KSOP Kupang yang telah ditandatangani	DKP Provinsi NTT dan KSOP Kupang	DKP Provinsi NTT, KSOP Kupang dan MDPI	September - Desember 2019	
6	Fasilitasi nelayan untuk mendapatkan SKK	Terlaksananya pelatihan SKK 60 mil oleh KSOP Kupang	KSOP Kupang dan DKP Provinsi NTT	KSOP Kupang dan DKP Provinsi NTT	Januari 2020	Koordinasi DKP Provinsi NTT dan KSOP Kupang
7	Pertemuan Reguler FCMC X dilaksanakan di Larantuka	Terlaksananya pertemuan Reguler di Larantuka	DKP Provinsi NTT, PT. Primo Indo Ikan, MDPI, AP2HI, Dinas Perikanan Kab. Flores Timur	DKP Provinsi NTT, PT. Primo Indo Ikan, MDPI, AP2HI, Dinas Perikanan Kab. Flores Timur	Januari 2020	Sharing Budget